

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH**

**(Studi Kasus Pada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan)**

**SKRIPSI**



**Nama : Rachma  
Nim : 222014211**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Rachma  
Nim : 222014211**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rachma

Nim : 222014211

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2019



Rachma

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah

Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan)

Nama : Rachma

NIM : 222014211

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

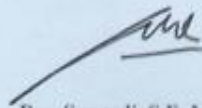
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan

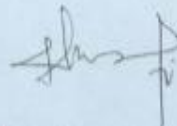
Pada tanggal

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si  
NIDN/NBM:20604630/784021



Nina Sabrina., SE., M.Si  
NIDN/NBM:0216056801/851119

Mengetahui,  
Dekan

u.h. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si, CA  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## ABSTRAK

**Rachma/222014211/2019/Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama 2 tahun (2016-2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Laporan Realisasi APBD tahun 2016-2017. Metode pengumpulan data yang digunakan analisis dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara bersama-sama pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial atau individual pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

***Kata kunci : Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, tingkat kemandirian keuangan daerah***

Abstract

Rachma / 222014211 / 2019 / The Influence of Local Own-Source Revenue and General Allocation Fund on Regional Financial Independence of Local Government in South Sumatera.

The problem of this study was how local own-source revenue and general allocation fund influenced regional financial independence of local government in South Sumatera. The objective of this study was to find out whether or not there was any significant influence of local own-source revenue and general allocation fund on regional financial independence of local government in South Sumatera. The associative study was employed in this study. The population and sample used in this study were 17 regencies / cities in South Sumatera during 2 years (2016-2017). The data used in this study was a secondary data which was Regional Government Budget Statements of 2016 – 2017. Techniques of collecting the data used was documentation. From the result of the study showed that there was a significant influence of local own-source revenue and general allocation fund on regional financial independence of local government. Partially or individually, the local own-source revenue gave significant and positive impact to the regional financial independence, while general allocation fund did not impact positively to the regional financial independence itself.

Keywords: Local Own-Source Revenue, General Allocation Fund, Regional Financial Independence



## PRAKATA



### **Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Segala puji dan bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan.

Penulisan skripsi ini membahas tentang pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum serta dampaknya pada tingkat kemandirian keuangan daerah. karenapendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam kaitannya dengan tingkat kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki peranan terkait dengan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang tuaku, Ayah H. Machmudin, Ibu Hj. Gufrani, Anak Muhammad Azka Setiawan, Suami Muhlisin, Adik Rachmi, Adik Alfina yang telah mendoakan dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si dan ibu Nina Sabrina S.E., M.Si selaku dosen pembimbingku yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan juga saran-saran dengan ikhlas dan penuh dengan kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta Staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta Staff dan karyawan/karyawati.

3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku ketua dan wakil Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Saekarini Yuliachtri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA selaku pembimbing akademik saya.
5. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh satff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak H. Akhmad Mukhlis, S.E.,M.Si selaku Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
7. Semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin

**Wassalamu'alikum Wr.Wb**

Palembang, Maret 2019

Rachma



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
1. Landasan Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	14
2. Pendapatan Daerah .....	14
3. Pendapatan Asli Daerah .....	15
4. Dana Alokasi Umum .....	19
5. Rasio Keuangan Daerah .....	21
A. Penelitian Sebelumnya .....	24
B. Kerangka Pemikiran .....	29
C. Hipotesis.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Operasionalisasi Variabel .....	34
D. Populasi dan Sampel .....	35

E. Data yang Diperlukan .....	35
F. Metode Pengumpulan Data .....	36
G. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian	
1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan .....	47
2. Visi dan Misi .....	48
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas .....	50
4. Proses Pengujian .....	70
B. Pembahasan	
1. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan .....	82
2. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial .....	83
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	86
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah, pemerintah lebih berhak dalam membuat kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Peningkatan hak-hak dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab diantaranya adalah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai program-program yang dijelankannya. Karena peningkatan kemandirian daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan daerah yang semakin baik.

Menurut Abdul (2014:101) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan hal utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara dana alokasi umum serta berbagai bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam

pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Pendapatan asli daerah itu sendiri merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas pendapatan daerah tersebut dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika struktur pendapatan asli daerah sudah kuat, maka daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat juga.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Abdul (2014:L-5) menjelaskan Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian

keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Kemandirian daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari karena yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kesumber-sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memuhi kebutuhan daerah masing-masing. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah.

Terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah. Salah satunya dengan pemberian dana alokasi umum. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di

dalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar kepada dana alokasi umum dibandingkan pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah.

Hal-hal yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah antara lain adalah pendapatan asli daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga meningkat, sebaliknya jika pendapatan asli daerah rendah maka kemandirian keuangan daerah juga rendah. Selain pendapatan asli daerah, hal yang mempengaruhi tingkat kemandirian daerah adalah dana alokasi umum. Jika dana alokasi umum meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan menurun.

Tiga pemberitaan mengenai kemandirian keuangan daerah antara lain seperti, Kemandirian Keuangan Provinsi Sulbar 18,9 Persen. Mamuju (ANTARA News) - Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sekitar 18,9 persen pada tahun 2011, nilai itu dianggap masih rendah dibandingkan dengan kemandirian keuangan yang ada di sejumlah Provinsi di Sulawesi. **Bisnis.com**, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan pendapatan hingga September 2018 mencapai R18,509 triliun. Capaian tersebut setara 75,82% dari target APBD Induk yang ditetapkan. Kendati demikian, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menilai realisasi pendapatan itu cukup baik, namun kemandirian keuangan daerah harus terus digenjot. Berbagai upaya kreatif mesti diimplementasikan untuk mencapai target pendapatan dan mendorong

kemandirian keuangan. “Yang penting bagaimana kita dapat menuju kemandirian keuangan daerah. Tahun ini kemandirian kita mencapai 53,23% dan tahun depan targetnya 54,27%,” terang pria yang disapa Gus Yasin, Rabu (7/11/2018). Kemudian Kemandirian Kabupaten Jember Dinilai Masih Rendah Kemandirian Kabupaten Jember Dinilai Masih Rendah Jember (beritajatim.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai kemandirian Kabupaten Jember masih relatif rendah. Penilaian ini tertuang dalam Surat Keputusan Evaluasi terhadap Rancangan APBD Kabupaten Jember 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2018 yang terbit pada 4 April. Dalam surat evaluasi itu disebutkan, pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD 2018 dianggarkan sebesar Rp 3,598 triliun. Rinciannya: Rp 589,281 miliar Pendapatan Asli Daerah (16,38 persen), Rp 2,41 triliun dana perimbangan (66,99 persen), dan Rp 589,7078 miliar dana lain-lain pendapatan daerah yang sah (16,64 persen).

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia, merupakan hasil pemecahan Provinsi Sumatera di Tahun 1950. Sampai pada 1998, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 10 Kabupaten/Kota. Sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini ada pemekaran daerah dan telah terbentuk 17 kabupaten dan 4 kota.

Kota Palembang, sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan saat ini menjadi salah satu kota tujuan di tanah air. Hal ini dikarenakan kondisi kota Palembang yang dalam 5 tahun terakhir mengalami kemajuan yang

begitu pesat, terlihat dari maraknya pertumbuhan infrastruktur, sarana dan prasarana kota, dan roda perekonomian yang terus menggeliat. Saat ini, kota Palembang telah berstatus sebagai kota yang metropolis. Indikator pencapaian kategori metropolis ini ditinjau dari segi kepadatan penduduk, tingkat perekonomian dan sarana dan prasarana yang tersedia serta variabel-variabel penunjang lainnya.

Untuk lebih mewujudkan *good public* dan *corporate governance*, otonomi daerah dirasa perlu diterapkan demi memberikan kewenangan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pembagian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah 2 di daerah didanai dari dan atas beban anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Belanja daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (16) didefinisikan sebagai



semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah tentang pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU).

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan lainlain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud sebelumnya.

Pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang kapasitas fiskalnya tinggi akan mendapat bagian transfer yang lebih kecil daripada pemerintah daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan potensi dan kemampuannya dalam membiayai pembangunan yang ada di daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat setempat sehingga secara otomatis akan meningkatkan kemandirian daerah tersebut dari sumbangan pemerintah pusat.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Reza (2013) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasah dan Maria (2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Reza (2013) menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dian dkk (2016) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan dengan pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah, pendapatan asli daerah terhadap realisasi APBD pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel I.1.

**Tabel I.1**  
**Data Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera**  
**Selatan Tahun 2016-2017**

Kab/Kota	Tahun	PAD (Jutaan Rupiah)	DAU (Jutaan Rupiah)	Bantuan Pemerintah (Jutaan Rupiah)
Lahat	2016	184.973	703.887	1.060.150
	2017	164.495	694.390	1.211.670
Musi Banyuasin	2016	169.012	324.837	2.327.685
	2017	209.410	344.295	2.284.442
Musi Rawas	2016	96.744	641.790	1.324.818
	2017	151.594	637.955	1.159.387
Muara Enim	2016	150.912	673.162	1.666.514
	2017	226.929	661.337	1.749.209
Ogan Komering Ilir	2016	108.992	1.049.995	1.472.007
	2017	222.961	1.042.870	1.493.738
Ogan Komering Ulu	2016	87.579	635.552	939.928
	2017	172.013	631.233	1.031.818
Palembang	2016	781.414	1.292.125	1.863.736
	2017	1.091.704	1.269.426	1.908.214
Prabumulih	2016	86.253	414.174	735.605
	2017	119.192	412.229	674.043
Pagar Alam	2016	51.113	390.188	611.993
	2017	65.538	387.411	680.367
Lubuk Linggau	2016	75.797	446.789	719.715
	2017	115.521	444.207	715.153
Banyuasin	2016	104.218	930.551	1.515.018
	2017	125.984	923.772	1.438.187
Ogan Ilir	2016	109.763	623.839	940.136
	2017	95.711	619.873	1.011.195
Oku Timur	2016	69.357	760.212	1.183.323
	2017	77.707	755.658	1.109.643
Oku Selatan	2016	35.697	588.216	866.483
	2017	89.454	585.269	871.408
Empat Lawang	2016	22.348	416.953	638.525
	2017	68.806	415.913	681.697
Penukal Abab Lematang Ilir	2016	26.350	319.054	655.635
	2017	56.934	317.402	801.951
Musi Rawas Utara	2016	32.175	378.122	682.015
	2017	57.580	378.211	611.766

Sumber : data yang diolah, 2018

Dilihat tabel I.1 jika standar kemandirian keuangan daerah semakin tinggi rasio kemandirian, menggambarkan kemandirian daerah yang semakin baik. Berdasarkan Tabel I.1 dari tahun 2016 ke tahun 2017 Kabupaten Pagar Alam memiliki kontribusi pendapatan asli daerah yang meningkat, namun tingkat kemandirian keuangan daerah menurun. Sedangkan menurut teori yang benar adalah jika pendapatan asli daerahnya meningkat maka tingkat kemandiriannya juga meningkat, sebaliknya jika pendapatan asli daerahnya menurun maka tingkat kemandiriannya menurun juga.

Kemudian Kabupaten Musi Banyuasin, musirawas utara memiliki kontribusi dana alokasi umum yang meningkat, namun tingkat kemandirian keuangan daerahnya juga meningkat. Sedangkan menurut teori jika suatu dana alokasi umum (DAU) meningkat maka tingkat kemandiriannya menurun, sebaliknya jika dana alokasi umum menurun maka tingkat kemandiriannya meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa penelitian sebelumnya yang terdapat perbedaan hasil penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

## **D. Manfaat Penelitian.**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berfikir dalam memperluas pengetahuan tentang tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bahan evaluasi serta pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, bahan pustaka dan ilmu pengetahuan bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Khusufi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. (edidi 4). Jakarta : Salemba Empat.
- Albert Kurniawan. (2014). *Metode Bisnis Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Budi Santoso. (2015). *Keagenan (Agency). Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Berita. (ANTARA News) Kemandirian Keuangan Provinsi Sulbar 18,9 Persen, **Bisnis.com**, SEMARANG Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan pendapatan hingga September 2018 mencapai R18,509 triliun, (beritajatim.com) Kemandirian Kabupaten Jember Dinilai Masih Rendah Kemandirian Kabupaten Jember Dinilai Masih Rendah.
- Dian Budi Susanti, Sri Rahayu, Siska P Yudowati.(2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014. E-Proceeding of Mangement. Vol 3(3) ISSN: 2355-9357. Di akses 5 Maret 2018, dari <http://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/121487/pengaruh-pendapatan-asli-daerah-dana-alokasi-umum-dan-dana-alokasi-khusus-terhadap-tingkat-kemandirian-keuangan-daerah-studi-pada-kota-kabupaten-di-provinsi-jawa-barat-tahun-2010-2014-.html>
- Ernawati dan Ikhsan Budi Riharjo. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 6(2) ISSN: 2460-0585. Di akses 1 april 2018, dari <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/2831/245>
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. (edisi 8). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Nurhasanah dan Maria. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Bengkulu. Vol 1(1) ISSN : 2579-969X. Di akses 13 Maret 2018, dari [jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/715](http://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/715)
- Nyoman Trisna Erawatil dan Leny Suzan. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung. e-Proceeding of Management. Vol 2(3). Di akses 13 Maret 2018, dari



[libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1700](http://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1700)

- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Renny Nur'aini, Desfitriana, Rooswhan Budi Utomo. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kota di Jawa Barat). *Proceeding PESAT (psikologi, ekonomi, sastra, arsitektur, teknik sipil)*. Vol 5. ISSN: 1858-2559. Diakses 1 April 2018, dari [ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/pesat/article/download/1181/1042](http://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/pesat/article/download/1181/1042)
- Reza Marizka. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah*. Vol 1(2) ISSN: 1979-738. Diakses 5 Maret 2018, dari [ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/796/552](http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/796/552).
- Septyas Virgi Ardhani. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandiria Keuangan Daerah, *Tax Effort* (Upaya Pajak), dan Alokasi Belanja Modal di Jawa Timur. Vol 2(3). Diakses 5 Maret 2018, dari [jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/10436](http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/10436)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.